



## KEKUASAAN DAN WACANA SOSIAL: HOAKS SEBAGAI KONTROL TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT

Yefta Noval<sup>1</sup>, Henri Sirangki<sup>2\*</sup>

Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Central Jawa, Indonesia<sup>1</sup>

Gereja Toraja Jemaat Buntu Panga' Klasis Basse Sangtempe', South Sulawesi, Indonesia<sup>2</sup>

henrisirangki11@gmail.com

**Abstract:** *In the digital era, hoaxes have become a phenomenon that cannot be understood merely as false information or lies that contradict truth. This research aims to analyze how hoaxes are produced and utilized within power relations to influence public perception regarding public policies, using Michel Foucault's power-knowledge perspective. This study employs qualitative methods with a literature review approach, analyzing various academic literature, scientific journals, and other relevant sources. The research findings demonstrate that hoaxes function not merely as erroneous information but also as discursive practices that shape how societies understand social and political reality. Through processes of repetition, dissemination, and normalization, hoaxes can be accepted as truth and influence public response to certain policies. This phenomenon is evident in several cases and public policies in Indonesia, including during the pandemic, free nutritious meal programs, and elections. This research affirms that the contest for truth in the public sphere cannot be separated from power relations, as those capable of shaping discourse have significant influence in determining what society considers true, legitimate, and trustworthy.*

**Keywords:** *hoaxes, social discourse, power, public policy*

**Abstrak:** Di era digital, hoaks telah menjadi fenomena yang tidak bisa dipahami sekadar sebagai informasi palsu atau kebohongan yang bertentangan dengan kebenaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hoaks diproduksi dan digunakan dalam relasi kekuasaan guna memengaruhi persepsi masyarakat terkait kebijakan publik, dengan menggunakan perspektif kuasa-pengetahuan Michel Foucault. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya berfungsi sebagai informasi yang keliru, tetapi juga sebagai praktik wacana yang membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial dan politik. Melalui proses pengulangan, penyebaran, dan normalisasi, hoaks dapat diterima sebagai kebenaran dan memengaruhi respons publik terhadap kebijakan tertentu. Fenomena ini terlihat dalam beberapa kasus dan kebijakan publik di Indonesia, seperti pada pandemi, program makanan bergizi gratis, hingga pemilu. Penelitian ini menegaskan bahwa perebutan kebenaran di ruang publik tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan, karena pihak yang mampu membentuk wacana memiliki pengaruh besar dalam menentukan apa yang dianggap benar, sah, dan layak dipercaya oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** hoaks, kebijakan publik, kekuasaan, wacana sosial

## 1. Pendahuluan

Distingsi antara fakta dan fiktif pada era modern semakin kabur dan secara praktis sulit diidentifikasi karena masyarakat telah hidup dalam dunia digital, sehingga semakin cepat dan bebas dalam menyebarkan serta mengonsumsi berbagai fenomena dan konten di ruang publik. Hoaks atau *fake news* sering kali dianggap sebagai informasi yang sengaja disebar untuk mengelabui orang atau sekelompok masyarakat, demi kepentingan politik ataupun kepentingan pribadi tertentu.<sup>1</sup> Sementara itu, hoaks juga dapat diartikan sebagai kebohongan yang direkayasa dengan tujuan mengaburkan atau mengalihkan perhatian orang lain dari kebenaran yang sesungguhnya, demi mendapatkan keuntungan tertentu, baik untuk diri sendiri maupun bagi beberapa kalangan atau kelompok tertentu.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, hoaks adalah informasi yang secara sadar sengaja diproduksi dengan tujuan tertentu, seperti membuat narasi-narasi palsu, menggiring opini, dan memengaruhi arah kebijakan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Lars Svendsen bahwa yang dimaksud dengan kebohongan (hoaks) adalah ketika seseorang sengaja menyampaikan sebuah informasi yang bertentangan dengan apa yang diyakininya.<sup>3</sup> Dalam kaitannya dengan ilmu sosial dan politik, fenomena hoaks turut berperan penting dalam dinamika sosial-politik. Hal ini karena ada kelindan antara kekuasaan dan produksi wacana sosial dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Masifnya penyebaran informasi maupun rumor dalam masyarakat melalui media sosial dan media elektronik turut membentuk opini dan sikap masyarakat terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan kehidupan sosial.<sup>4</sup> Dalam hal ini, hoaks tidak cukup dipahami sebagai berita bohong yang bertentangan dengan kebenaran, melainkan sebagai fenomena sosial yang jauh lebih kompleks, yakni praktik diskursif yang tumbuh dari dan di dalam relasi kekuasaan. Dengan demikian, menyebut hoaks sebagai wacana berarti tidak hanya membicarakan bagaimana individu memproduksi dan mengonsumsi informasi, tetapi terutama melihat hoaks sebagai fenomena yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Rut Rismanta Silalahi and Vinta Sevilla, "Rekonstruksi Makna Hoaks Di Tengah Arus Informasi Digital," *GLOBAL KOMUNIKA* 1, no. 1 (2020): 10.

<sup>2</sup> Janner Simarmata et al., *Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing* (yayasan kita menulis, 2019), 3.

<sup>3</sup> Lars Svendsen, *Filsafat Kebohongan*, ed. Anton Kurnia, Terjemahan (Tangerang: Penerbit Baca, 2022), 43–45.

<sup>4</sup> Aris Sarjito, "Hoaks, Disinformasi, Dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia," *Journal of Governance and Local Politics* 6, no. 2 (2024): 178, <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547>.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memberikan gambaran penting bagaimana hoaks menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, terutama dalam kaitannya dengan arah kebijakan publik dan kehidupan bermasyarakat. Penyebaran informasi bermuatan hoaks dinilai banyak bermunculan menjelang pemilihan umum, sebagaimana dalam terjadi pada pemilihan umum dari tahun 2019 dan juga menjelang pemilu tahun 2024.<sup>5</sup> Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemantau media sosial, menunjukkan bahwa platform media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga Whatsapp disebut sebagai media yang paling rentan digunakan melakukan penyebaran hoaks.<sup>6</sup> Fenomena ini dapat memengaruhi cara pandang masyarakat bahkan dapat memicu keretakan dalam relasi kehidupan sosial mereka.

Untuk memahami fenomena hoaks dalam masyarakat sebagai bagian dari wacana sosial, maka teori Michel Foucault dapat digunakan untuk menganalisisnya secara mendalam. Pertama-tama, Foucault menganggap kekuasaan sebagai jaringan relasi yang tersebar dan bekerja dalam seluruh lapisan dan struktur sosial, sehingga kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki individu atau kelompok tertentu. Menurutnya, diskursus bukan hanya cara berbicara atau berpikir tentang sesuatu, tetapi juga sistem representasi yang membentuk objek pembicaraan. Foucault memandang bahwa ilmu pengetahuan tidak netral, tetapi justru memuat nilai politis, artinya, pengetahuan selalu terkait dengan kekuasaan yang ada di sekitarnya.<sup>7</sup> Dengan demikian, pengetahuan dan kekuasaan tidak pernah bisa dipisahkan, melainkan selalu terdapat irisan antara produksi pengetahuan dan kekuasaan. Adapun kekuasaan selalu bekerja melalui hubungan-hubungan antara individu-individu maupun kelompok yang dapat memperkuat, membentuk, atau memisahkan hubungan tersebut. Karena itu, kekuasaan dapat dipahami pula sebagai sebuah strategi yang dampaknya dapat dilihat dari bagaimana hubungan-hubungan itu saling mempengaruhi.<sup>8</sup>

Selain itu, untuk memahami bagaimana wacana dan hoaks dipakai sebagai alat kontrol dalam konteks kebijakan publik, dalam teorinya Foucault menjelaskan tentang hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan diskursus. Menurut Foucault, pihak-pihak yang memiliki agenda dan kepentingan tertentu dapat mengarahkan arus wacana publik, membentuk opini, dan membentuk kebijakan melalui penyebaran informasi palsu yang cenderung menyesatkan. Proses ini melibatkan apa yang Foucault sebut sebagai "normalisasi", yaitu ketika suatu klaim atau wacana terus diulang-ulang dan

---

<sup>5</sup> A. Rivai Beta et al., "Literasi Digital Pada Remaja Dalam Upaya Menangkal Informasi Hoax Jelang Pemilu 2024," *Jurnal JPPMI* 1 (2022): 17-21, 6.

<sup>6</sup> Febriansyah and Nani Murani Muksin, "Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, Dan Ancaman Disintegrasi Bangsa," *Jurnal Sebatik* 24, no. 2 (2020): 194, <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1091>.

<sup>7</sup> Ivan Manokha, "Konsep Foucault Tentang Kekuasaan Dan Diskursus Global Hak-Hak Asasi Manusia," in *Michel Foucault Dan Hubungan Internasional: Kajian Kritis Terkini* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 159.

<sup>8</sup> Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," *Jurnal Al-Khitabah* 3, no. 1 (2017): 120.

disebarluaskan hingga perlahan dianggap sebagai kewajaran dan kebenaran oleh masyarakat. Foucault memandang bahwa dalam suatu negara modern, individu dan kelompok diubah masyarakat menjadi kumpulan-kumpulan subjek terlatih yang mengalami pendisiplinan, sehingga tanpa disadari mereka selalu patuh dan taat pada standar kebenaran yang telah dinormalisasi tersebut.<sup>9</sup>

Adapun kajian dan penelitian terdahulu terkait fenomena hoaks dalam kaitannya dengan kebijakan publik, telah diuraikan dalam beberapa penelitian: pertama, oleh Wisnu Martha Adiputra dengan judul “Antara Kuasa Kebohongan dan kebebasan Beropini Warga: Analisis Foucauldian pada Hoaks Pandemi Corona di Indonesia”, melalui analisis menggunakan perspektif Foucault, penelitian ini menunjukkan bahwa hoaks berdampak besar pada pengetahuan, emosi, dan tindakan masyarakat selama pandemi. Hoaks juga dianggap memicu perdebatan dalam masyarakat terkait pihak mana yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang benar, terutama ketika pihak berwenang terlibat. Selain itu, hoaks mencerminkan mekanisme kekuasaan yang memengaruhi identitas, perilaku, kesehatan publik, dan pengambilan keputusan.<sup>10</sup>

Kedua, penelitian oleh Yopita Desriana Butar dengan judul “Analisis Penyebaran Hoax di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Masyarakat” yang menguraikan bahwa faktor utama penyebaran hoax adalah kurangnya literasi digital sehingga beberapa kelompok masyarakat kurang mampu membedakan antara berita valid dan yang menyesatkan. Selain itu, hoaks dengan cepat menyebar yang menyebabkan kepercayaan publik menurun dan dapat memicu kebingungan sosial. Selain itu menurut Butar, hoaks dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau kebijakan sehingga dapat berdampak pada kehidupan sosial pribadi maupun yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

Ketiga, penelitian oleh Febriansyah Putra dan Haldi Patra dalam “Analisis Hoax Pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik” mengungkapkan bahwa berkembangnya teknologi turut berperan dalam masifnya penyebaran hoaks, khususnya menjelang pemilu. Penyebaran hoaks dianggap sebagai salah satu faktor negatif dalam berlangsungnya proses demokrasi yang sehat, terutama dalam menjamin integritas demokrasi sebagai pilar penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya pendidikan politik dalam memutus rantai hoaks agar masyarakat menjadi lebih kritis dalam menyerap berbagai jenis informasi.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan,

---

<sup>9</sup> Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interview and Other Writings 1972-1977*, ed. C. Gordon, Terjemahan (New York: Pantheon, 1984), 255.

<sup>10</sup> Wisnu Martha Adiputra, “Antara Kuasa Dan Kebohongan Dan Kebebasan Beropini Warga: Analisis Wacana Foucauldian Pada Hoaks Pandemi Corona Di Indonesia,” *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2021): 19–20.

<sup>11</sup> Yopita Desriana Butar, “Analisis Penyebaran Hoax Di Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat,” *JPBB: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 2, no. 3 (2024): 242–48.

<sup>12</sup> Febriansyah Putra and Haldi Patra, “Analisis Hoax Pada Pemilu: Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan Politik,” *Naradidik: Jurnal Of Education & Pedagogy* 1, no. 2 (2023): 95–102.

penelitian ini akan berada berbeda karena tulisan ini difokuskan pada bagaimana kekuasaan yang berkelindan dengan pengetahuan dapat digunakan sebagai instrumen untuk memengaruhi kebijakan publik. Hoaks dalam tulisan ini dipandang sebagai hasil produksi dari kekuasaan dan pengetahuan, dimana hoaks memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan publik di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hoaks diproduksi bukan semata-mata sebagai kebohongan atau yang bertentangan dengan kebenaran, namun sebagai cara untuk mengontrol kebijakan publik dengan menggunakan aspek relasi kuasa, pengetahuan, dan pengendalian. Penelitian ini menggunakan konsep pemikiran kekuasaan Michel Foucault dan pendekatan diskursusnya. Selain itu, kajian ini akan menganalisis bagaimana hoaks diproduksi dan dinaturalisasi sehingga nampak sebagai kebenaran, yang sekaligus menjadi bagian dari strategi kekuasaan untuk mempengaruhi wacana publik dan kebijakan di Indonesia. Studi Foucault mengenai wacana sosial juga diharapkan membantu individu dan kelompok masyarakat mengembangkan pemikiran kritis terhadap setiap kebijakan publik, yakni dengan memproduksi wacana tandingan (resistensi).

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode ini merupakan metode pengumpulan data pada latar alamiah (lapangan) dengan maksud menafsirkan apa yang terjadi.<sup>13</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka atau studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang dianggap relevan sebagai dasar teori dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yakni data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia sebelumnya dan diperoleh dari berbagai sumber seperti: buku,<sup>14</sup> artikel, jurnal dan referensi lainnya yang relevan dalam membahas pemikiran-pemikiran Michel Foucault tentang kekuasaan dan wacana sosial, termasuk literatur yang menguraikan fenomena produksi hoaks khususnya yang terjadi di Indonesia. Dalam proses analisis data, penulis menggunakan tiga jalur untuk menganalisis hasil temuan dengan metode analisis data Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data selama mengumpulkan data memaksa peneliti untuk memikirkan data yang ada dan mengembangkan alternatif untuk mengumpulkan data baru.<sup>15</sup> tahapan pertama ialah reduksi data, yang di dalamnya memilih, mengelompokkan (meringkas), dan merangkum data. Tahapan Kedua adalah penyajian data, merupakan cara peneliti menyusun data yang diterima, dalam hal ini data

---

<sup>13</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 7-8.

<sup>14</sup> M. Afdhal Chatra et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 16.

<sup>15</sup> Sofwatillah et al., "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79-91, <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.

yang disajikan dalam bentuk teks naratif deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis data bersifat induktif/kualitatif sehingga hasil penelitian tidak bersifat generalisasi, melainkan menekankan makna. Tahapan ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana peneliti memberi interpretasi dari data yang diterima selama penelitian berlangsung.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### **Teori Kekuasaan, Pengetahuan dan Wacana Sosial Foucault**

Michel Foucault merupakan filsuf dan sekaligus seorang sosiolog berkebangsaan Prancis yang lahir pada tahun 1926. Selama periode awal kerja Foucault di Ecole Normale, garis utama pemikirannya terdiri dari Marxisme, eksistensialisme, dan kemudian strukturalisme. Karya Foucault dapat dianggap sebagai yang sangat menentang Marxisme Sartrean, Pengaruh Nietzsche sangat menentukan Foucault, dan dia sangat menentang gagasan humanistik Marxisme eksistensialis.<sup>16</sup> Motif utama dalam konsep pemikiran Foucault bukan pada kebenaran, melainkan pada “kekuasaan”. Dalam pandangannya, kebenaran sejak awal sudah tidak netral karena dipengaruhi dan dibentuk oleh relasi-relasi kekuasaan melalui bahasa dan diskursus yang berkembang dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Gagasan utama dalam pemikiran Michel Foucault adalah konsep tentang *power/knowledge*, yang menegaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan tidak pernah dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya saling terbentuk secara bersamaan. Hubungan keduanya inilah yang kemudian dikenal sebagai relasi kuasa-pengetahuan.<sup>18</sup> Dalam pandangan Foucault, pengetahuan itu bukan tentang gambaran akan kenyataan yang netral, namun justru sesuatu yang diproduksi dalam jaringan relasi kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan juga tidak bisa bertahan dan berjalan tanpa adanya pengetahuan yang melegitimasi dan mereproduksinya. Oleh karena itu, tidak ada pengetahuan yang murni dan bebas nilai, karena setiap klaim kebenaran selalu berkelindan dengan kuasa yang melatarbelakanginya.<sup>19</sup> Relasi kuasa dan pengetahuan inilah yang kemudian menentukan batas antara apa yang dianggap sah, ilmiah, dan dapat dipercaya dengan apa yang dianggap menyimpang, tidak valid, atau bohong. Dari sini dapat diketahui bahwa perdebatan tentang yang dimaksud kebenaran selalu merupakan pertarungan atas kekuasaan, sehingga tidak ada satu pun narasi dalam ruang publik termasuk hoaks, yang benar-benar bebas dari relasi kuasa di dalamnya.

---

<sup>16</sup> Abdullah Khozin Af, “Konsep Kekuasaan Michel Foucault,” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2012): 133.

<sup>17</sup> F. Budi Hardiman, *Kebeneran Dan Para Kritikusny: Mengulik Idea Besar Yang Memandu Zaman Kita* (Yogyakarta: Kanasius, 2023), 128–131.

<sup>18</sup> Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, ed. Alan Sheridan, Terj. (New York: Discipline and Punish: The Birth of the Prison, 1975), 27–28.

<sup>19</sup> Iswandi Syahputra, “Post Media Literacy: Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault,” *Jurnal ASPIKOM* 1, no. 1 (2010): 11.

Michel Foucault juga dikenal memiliki tiga konsep penting dalam pemikirannya yaitu: Pengetahuan, Kekuasaan dan Seksualitas. Pengetahuan dan kekuasaan senantiasa memiliki kelindan, sebab pengetahuan yang berawal dari yang disebut *epistime* dari waktu ke waktu, kemudian membentuk dan mempengaruhi kekuasaan. Dalam konsep Foucault, Produksi pengetahuan yang mempengaruhi kekuasaan disebut sebagai wacana atau diskursus. Wacana dalam pemikiran Foucault secara sederhana didefinisikan sebagai cara atau otoritas untuk menjelaskan sesuatu yang diciptakan oleh kekuasaan atau pemerintahan.<sup>20</sup> Dengan demikian, menurut Foucault, pihak yang memiliki akses terhadap pengetahuan selalu dapat menciptakan dan membangun berbagai narasi yang dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan atau memengaruhi opini publik.

Foucault dalam *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1975) mengungkapkan bahwa pengetahuan adalah konstruksi sosial yang terbentuk melalui relasi kekuasaan, Ia menegaskan bahwa "kebenaran" yang diakui merupakan hasil dari praktik-praktik wacana yang telah distandarisasi dan dilembagakan:

*We should admit rather that power produces knowledge (and not simply by encouraging it because it serves power or by applying it because it is useful); that power and knowledge directly imply one another; that there is no power relation without the correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time power relations. These 'power-knowledge relations' are to be analysed, therefore, not on the basis of a subject of knowledge who is or is not free in relation to the power system, but, on the contrary, the subject who knows, the objects to be known and the modalities of knowledge must be regarded as so many effects of these fundamental implications of power-knowledge and their historical transformations. In short, it is not the activity of the subject of knowledge that produces a corpus of knowledge, useful or resistant to power, but power-knowledge, the processes and struggles that traverse it and of which it is made up, that determines the forms and possible domains of knowledge.*<sup>21</sup>

Dengan demikian, pengetahuan tidak selalu objektif melainkan dapat berfungsi sebagai cara untuk mempertahankan dan memperkuat dominasi kekuasaan yang ada atau yang disebut sebagai "Relasi-Kuasa". Produksi dan penyebaran hoaks adalah tindakan diskursif yang bertujuan untuk mengubah realitas sosial tertentu sesuai dengan kemauan yang berkuasa. Selain itu, Foucault juga memiliki gagasan penting tentang "rezim kebenaran", yaitu semacam mekanisme yang dianggap dapat memproduksi kebenaran dalam suatu masyarakat. Tidak hanya memproduksi kebenaran, tetapi turut mempengaruhi keberadaan individu dalam masyarakat, termasuk mengkategorikan mereka yang dianggap "gila" atau sakit jiwa. Mereka yang dinilai tidak mampu berpikir secara rasional tidak akan memiliki suara atau pengaruh dalam sebuah perdebatan atau

---

<sup>20</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman Dan Seksualitas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 129.

<sup>21</sup> Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 27.

diskusi.<sup>22</sup> Hoaks dapat dianggap sebagai upaya untuk membangun “rezim kebenaran” alternatif yang menguntungkan kelompok tertentu di era *post-truth*, di mana fakta objektif sering kali lebih memengaruhi opini publik daripada emosi dan keyakinan pribadi.

Konsep kekuasaan dalam pemikiran Foucault bermula dari proses pengembangan pengetahuan atau yang dikenal dengan *epistime*. Epistime didefinisikan sebagai konsep dasar berpikir manusia dalam terjadi dan berkembang dalam periode dan masa tertentu.<sup>23</sup> Foucault mengubah pandangan lama tentang kekuasaan, yang masih menganggapnya sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh individu atau lembaga tertentu. Foucault justru menegaskan bahwa kekuasaan tersebar di seluruh jaringan hubungan sosial, bukan hanya dari atas ke bawah.<sup>24</sup> Hampir semua aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh kekuasaan yang hadir melalui wacana, mulai dari cara berbicara, berpikir, hingga memahami dunia. Wacanalalah yang menjadi cara bagi manusia untuk memahami realitas sosial dan kebenaran yang diterima.<sup>25</sup> Sementara itu, pengetahuan yang dimiliki oleh penguasa digunakan sebagai kekuatan untuk mengatur masyarakat agar taat berdasarkan wacana-wacana yang diinginkan penguasa.

Terdapat pula Gagasan Foucault tentang *Discursive Formation* yang adalah komponen penting dari karyanya. Foucault berpandangan bahwa wacana tidak hanya menunjukkan realitas sosial saja, tetapi juga turut dalam membentuk dan menghasilkan realitas tersebut.<sup>26</sup> Dalam wacana, terdapat pembagian klasifikasi sosial masyarakat antara yang *normal* dan *abnormal*. Klasifikasi dan kategori ini kemudian digunakan untuk mengatur tatanan masyarakat. Dalam konteks wacana medis, misalnya, definisi *kegilaan* tidak didasarkan pada gejala biologis saja, tetapi juga pada norma-norma sosial. Foucault menganggap cara pengkategorian semacam ini sebagai cara kekuasaan untuk menghakimi seseorang atau sekelompok orang atas dengan membedakan orang sakit dari orang sehat.<sup>27</sup> Foucault menemukan bahwa pada era Renaisans, akal sehat dan kegilaan dianggap saling berkaitan dan tidak terpisahkan, karena keduanya dipahami melalui bahasa yang sama.<sup>28</sup> Kekuasaan yang hadir di mana-mana mampu menciptakan berbagai wacana yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan dan perilaku sosial sehari-hari.<sup>29</sup> Kekuasaan bagi Foucault tidak hanya berada di istana, tetapi menyebar dalam struktur

---

<sup>22</sup> Albert Wirya, “Rezim Kebenaran Rasionalisme Dalam Diskursus Kegilaan Dan Tindakan Pendisiplinan Pasung Sebagai Kejahatan,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 9, no. 1 (2013): 3.

<sup>23</sup> Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman Dan Seksualitas*, 35.

<sup>24</sup> Michel Foucault, *The History of Sexuality: Vol. I An Introduction* (New York: Pantheon Books, 1978), 93.

<sup>25</sup> Kamahi, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik,” 118.

<sup>26</sup> Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interview and Other Writings 1972-1977*, 63.

<sup>27</sup> Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 304.

<sup>28</sup> Abdullah Khozin Af, “Konsep Kekuasaan Michel Foucault,” 142.

<sup>29</sup> Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman Dan Seksualitas*, 47.

masyarakat. Dengan demikian, wacana sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol, memperkuat atau mempertahankan status quo kekuasaan.

Foucault juga mengembangkan konsep *biopower* dan *governmentality* sebagai dua bagian kekuasaan yang bekerja dalam masyarakat modern. *Biopower* merujuk pada sistem kekuasaan yang menjadikan kehidupan manusia sebagai objek pengelolaan mulai dari kebijakan kesehatan, pendidikan, hingga pengaturan demografi populasi.<sup>30</sup> *Biopower* adalah cara kekuasaan yang bertujuan mengendalikan kehidupan manusia, khususnya dengan mengontrol karakteristik dan perilaku suatu populasi, serta mengelola berbagai kejadian yang dapat diprediksi dan diarahkan sesuai kepentingan tertentu.<sup>31</sup> Sementara itu, konsep *governmentality* menggambarkan cara negara menata masyarakat melalui dua jalur sekaligus, yakni regulasi formal seperti hukum dan peraturan, serta pengaruh informal melalui norma sosial dan budaya. Keduanya menjadi kunci untuk menelusuri bagaimana wacana ikut membentuk tindakan individu maupun pola kehidupan kolektif

Martono dalam bukunya *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault* menjelaskan tentang empat hal yang menjadi konsekuensi dari keterkaitan wacana dengan kekuasaan. *pertama*, kekuasaan dan wacana yang saling berkelindan membentuk klaim-klaim kebenaran yang diterima dan diyakini secara bersama-sama. *Kedua*, melalui klaim-klaim kebenaran yang telah terbentuk, lembaga-lembaga sosial modern memanfaatkan berbagai teknologi modern untuk mengatur manusia sebagai objek kekuasaan. *Ketiga*, kekuasaan dan subjek saling terkait sehingga kekuasaan tidak hanya menundukkan subjek, tetapi juga membuat subjek membentuk identitas mereka sendiri dengan membangun kesadaran atau pengetahuan diri. *Keempat*, kekuatan dan perlawanan tumbuh bersama secara intrinsik, dan hal ini belum tentu menjadi kebenaran bahwa keberadaan sebuah perlawanan menyebabkan perubahan hubungan kekuasaan.<sup>32</sup>

### **Hoaks sebagai Wacana Sosial**

Di era digital, hoaks telah menjadi fenomena sosial yang serius dan krusial. Hoaks lebih dari sekadar informasi palsu, hoaks adalah alat untuk menciptakan, menyebarluaskan, dan memengaruhi wacana sosial dalam masyarakat. Hal ini bekerja melalui mekanisme wacana yang digagas oleh Michel Foucault, di mana pengetahuan dan kekuasaan saling terkait untuk membentuk realitas, sehingga dalam masyarakat tercipta rezim kebenaran.<sup>33</sup> Dalam konteks ini, hoaks merupakan hasil dari kekuatan yang mengendalikan persepsi publik terhadap suatu masalah tertentu. Dengan memahami hoaks sebagai wacana sosial, dapat dilihat bagaimana hoaks menciptakan narasi yang membentuk opini publik, membangun norma sosial, dan mengarahkan perilaku kolektif.

---

<sup>30</sup> Foucault, *The History of Sexuality : Vol. I An Introduction*, 139–40.

<sup>31</sup> Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," 126.

<sup>32</sup> Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman Dan Seksualitas*, 50.

<sup>33</sup> Martono, 50.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa salah satu jenis diskursus yang menghasilkan realitas alternatif adalah hoaks. Berita hoaks sering kali mengubah fakta untuk membentuk persepsi masyarakat. Sebagai contoh, dalam dunia politik, hoaks tentang peserta pemilu dapat menciptakan persepsi positif atau negatif tentang mereka, meskipun faktanya tidak selalu benar.

Menurut Foucault, wacana adalah praktik-praktik yang secara sistematis membentuk subjek diskusi.<sup>34</sup> Dalam konteks ini, hoaks sebagai wacana mencakup tidak hanya apa yang disebarkan tetapi juga bagaimana informasi tersebut dibuat, didistribusikan, dan diterima oleh masyarakat. Hoaks terjadi dalam situasi sosial dan politik tertentu, di mana individu dan kelompok yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi melalui platform digital juga memiliki kekuasaan.<sup>35</sup> Oleh karena itu, yang paling berbahaya dari hoaks bukanlah kebohongan yang dikandungnya, melainkan kemampuannya untuk dinaturalisasi dan dinormalisasi sebagai kebenaran sehingga masyarakat dapat menerimanya begitu saja tanpa menyadari bahwa di baliknya bekerja relasi kekuasaan yang membentuk cara mereka memandang realitas.

Produksi hoaks yang dibungkus sedemikian rupa dengan berbagai macam narasi dalam ruang publik, dapat diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang sah dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini karena masyarakat telah hidup dalam apa yang disebut Foucault sebagai praktik normalisasi. Seolah-olah setiap keputusan yang diambil oleh pihak berkuasa tidak dapat ditentang. Foucault hanya menyatakan bahwa kekuasaan tidak dapat dilaksanakan tanpa serangkaian tujuan. Foucault tidak memberikan petunjuk atau cara untuk melepaskan diri dari kekuasaan. Karena kekuasaan telah dinormalisasi, tidak ada yang dapat disalahkan.<sup>36</sup> Strategi normalisasi digunakan oleh penguasa yang otoriter untuk melanggengkan kebijakan-kebijakan publik sesuai keinginan mereka. Foucault mengaskan bahwa kekuasaan selalu berubah dan dapat berasal dari berbagai sumber. Dalam hal ini, cara kita berinteraksi dengan informasi telah diubah oleh media sosial. Pengguna media sosial sekarang dapat membuat dan menyebarkan pesan secara langsung tanpa harus menggunakan saluran konvensional. Individu biasa dapat berfungsi sebagai agen perubahan atau menyebarkan disinformasi, sehingga menciptakan *kuasa berpilin*.<sup>37</sup> Oleh karena itu, hoaks bukan hanya masalah komunikasi, tetapi juga masalah bagi struktur kekuasaan yang ada.

---

<sup>34</sup> Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge* (London dan New York: Routledge Classics, 1969), 54.

<sup>35</sup> Wisnu Martha Adipura, "Antara Kuasa Dan Kebohongan Dan Kebebasan Beropini Warga: Analisis Wacana Foucauldian Pada Hoaks Pandemi Corona Di Indonesia," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2021): 15-17.

<sup>36</sup> Syahputra, "Post Media Literacy: Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault," 7.

<sup>37</sup> Wisnu Martha Adipura, "Antara Kuasa Dan Kebohongan Dan Kebebasan Beropini Warga: Analisis Wacana Foucauldian Pada Hoaks Pandemi Corona Di Indonesia," 15.

Foucault mengungkapkan bahwa wacana atau diskursus mengatur apa yang boleh dikatakan, siapa yang boleh mengatakan, bagaimana dan kapan. Juga, diskursus menggabungkan bahasa dan praktik serta merujuk pada semua cara dan aturannya.<sup>38</sup> Pandangan Foucault ini mengokohkan bahwa wacana sosial melalui produksi Hoaks sangat mungkin menjadi instrumen dalam mengatur kebijakan dan kontrol sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hoax berasal dari konflik kekuasaan yang rumit, bukan dari ketidaktahuan sosial. Seringkali, aktor dengan agenda tertentu, seperti pemerintah, kelompok politik, atau entitas ekonomi, terlibat dalam penyebaran hoaks. Aktor-aktor ini dapat memobilisasi dukungan, menekan oposisi, atau membuat masyarakat bingung dengan menggunakan hoaks. Adapun hoaks dalam kaitannya dengan kebijakan publik atau masalah agama sering digunakan di Indonesia untuk mempengaruhi keputusan politik atau menguatkan identitas kelompok tertentu.

### **Dampak Hoaks terhadap Kebijakan Publik**

Bertolak dari konsep pemikiran Foucault yang telah diuraikan, hoaks tidak semestinya dipahami secara sempit sekadar sebagai informasi yang salah atau berita yang menyesatkan. Hoaks adalah praktik diskursif yang bekerja di dalam relasi kekuasaan untuk membentuk, mendistorsi, dan bahkan menghancurkan kondisi di mana sebuah kebijakan publik bisa diterima atau ditolak oleh masyarakat. Hoaks sebagai diskursus mengimplikasikan upaya membangun, mengokohkan, atau bahkan merebut legitimasi dan pemegang otoritas. Selain itu, fenomena hoaks tidak bisa dilepaskan dari asas dasar kehidupan demokrasi karena di sinilah pertarungan makna, kebenaran, dan kekuasaan berlangsung secara paling nyata. Kekuatan pengetahuan yang bertalian dengan kekuasaan memberi kemampuan kepada berbagai pihak untuk memproduksi wacana-wacana sosial yang memengaruhi cara masyarakat memahami kebijakan publik. Hoaks dalam konteks ini bukan sekadar kebohongan biasa namun adalah alat diskursif yang secara strategis memanipulasi opini publik untuk mendukung atau menolak tujuan-tujuan tertentu.

Berdasarkan teori Michel Foucault tentang wacana dan kekuasaan, hoaks dapat dianggap sebagai alat diskursus yang memanipulasi opini publik untuk mendukung tujuan tertentu. Sebagai wacana sosial, hoaks berfokus pada hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam membentuk formasi diskursif untuk mempertahankan sistem kebenaran.<sup>39</sup> Selain itu, hoaks meningkatkan polarisasi politik, yang berdampak negatif pada stabilitas sosial dan keberhasilan kebijakan publik. Hal ini karena masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan, sehingga menjadi lebih sulit untuk menerapkan kebijakan karena setiap kelompok

---

<sup>38</sup> Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Pengetahuan-Kekuasaan Foucault," *Jurnal Imlu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2021): 5.

<sup>39</sup> I Putu Gede Suyoga and I Made Gede Anadhi, *Pemaknaan Hoax Sebagai Wacana Sosial, Prosiding Nasional Filsafat* (Denpasar: IHDN Press, 2019), 139.

melihat kebijakan dari sudut pandang ideologis mereka sendiri. Kemampuan hoaks untuk memengaruhi kebijakan publik terletak bukan semata pada kebohongan yang dikandungnya, melainkan pada kemampuannya untuk masuk ke dalam celah-celah ketidakpercayaan yang sudah ada di masyarakat, memperkuatnya, dan menaturalisasinya sebagai kerangka berpikir yang diterima sebagai kebenaran. Dalam proses inilah hoaks menjadi alat yang paling efektif untuk mengintervensi kebijakan, hoaks bahkan tidak perlu mengubah fakta cukup mengubah cara publik memaknai fakta tersebut, dan dari situlah legitimasi sebuah kebijakan mulai goyah.

Hoaks agama atau etnis di Indonesia adalah contoh nyata, yang sering digunakan untuk memobilisasi massa atau melemahkan lawan politik. Kondisi demikian dapat disaksikan dalam polarisasi menjelang Pilkada 2017 di DKI Jakarta juga menjelang Pemilu tahun 2024, dimana produksi Hoaks yang bertalian dengan agama dan identitas meningkat dan sangat terasa. Produksi hoaks selalu berkelindan dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, karena memang demikianlah tujuan dari sebuah wacana. Sebagaimana ditegaskan Foucault, bahasa sebagai sebuah wacana tidak pernah bersifat netral, ia selalu mengandung aturan yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu sekaligus meminggirkan kelompok lainnya.<sup>40</sup> Dalam konteks ini, penyebaran hoaks yang memanfaatkan isu agama dan identitas tidak hanya menghasilkan informasi yang keliru, tetapi juga membangun cara pandang yang membelah masyarakat menjadi kelompok “kita” dan “mereka”. Akibatnya, ruang publik menjadi semakin terpolarisasi, kepercayaan antarkelompok melemah, dan upaya pemerintah untuk menjalankan kebijakan sering kali menghadapi resistensi yang lebih besar

Namun, lebih dari semua itu, yang paling mendasar dalam kerangka Foucault adalah kesadaran bahwa kebenaran selalu berada dalam relasi kuasa dan dibentuk melalui berbagai rezim kebenaran. Karena kuasa tidak pernah terpusat secara mutlak pada satu aktor, termasuk negara, tidak ada pihak yang dapat memonopoli kebenaran atau mengakhiri secara definitif pertarungan wacana dalam masyarakat. Yang bisa dilakukan adalah membangun kondisi agar pertarungan wacana itu berlangsung lebih adil, lebih terbuka, dan memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan oleh rezim kebenaran yang dominan. Penyebaran hoaks di media sosial menimbulkan berbagai dampak negatif seperti hilangnya kepercayaan publik, munculnya kesalahpahaman, hingga potensi konflik sosial dan penguatan kapasitas warga negara dalam menghadapi hoaks tidak hanya berdampak pada penanggulangan disinformasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas institusi dan keadilan digital yang menjadi prasyarat bagi kebijakan publik yang benar-benar melayani kepentingan rakyat. Dengan demikian, pertarungan melawan hoaks dalam konteks kebijakan publik Indonesia pada akhirnya adalah pertarungan untuk membangun demokrasi yang lebih dewasa, demokrasi yang tidak hanya mampu memproduksi kebijakan yang baik, tetapi juga

---

<sup>40</sup> Syahputra, “Post Media Literacy: Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault,” 9.

mampu menciptakan kondisi di mana masyarakat memiliki kemampuan kritis untuk menilai kebijakan itu secara jujur dan mandiri.

### **Kekuasaan dan Wacana Sosial Perspektif Foucault terhadap Hoaks sebagai Kontrol Kebijakan Publik**

Hoaks tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi palsu, tetapi juga merupakan praktik diskursif yang memiliki implikasi politik. Ketika sebuah hoaks beredar mengenai suatu kebijakan, yang dipertaruhkan bukan hanya kebenaran informasi, melainkan juga kewenangan untuk menentukan apa yang dianggap benar, sah, dan layak dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, hoaks tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah komunikasi atau penyebaran informasi yang salah, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika kekuasaan yang memengaruhi pembentukan opini publik dan legitimasi politik.<sup>41</sup>

Melalui konsep rezim kebenaran, Foucault menunjukkan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang berdiri netral di luar relasi sosial, melainkan hasil dari jaringan kekuasaan yang menentukan pengetahuan mana yang dapat diterima sebagai benar, siapa yang memiliki otoritas untuk mengucapkannya, dan prosedur apa yang digunakan untuk memverifikasinya. Dalam perspektif ini, kekuasaan tidak hanya mengatur tindakan manusia, tetapi juga membentuk horizon pemikiran (*epistemi*) yang menentukan apa yang dapat diketahui, dipikirkan, dan dipercayai.<sup>42</sup> Karena itu, pertarungan politik pada dasarnya juga merupakan pertarungan untuk mengendalikan produksi kebenaran. Namun, rezim kebenaran tidak terutama bekerja melalui represi atau paksaan secara langsung. Sistem ini beroperasi melalui mekanisme normalisasi yang membuat suatu wacana tampak alami, masuk akal, dan tidak dapat dibantah. Sebuah narasi memperoleh status sebagai “kebenaran” bukan semata karena kesesuaiannya dengan fakta, melainkan karena terus-menerus direproduksi oleh institusi, media, politisi, dan praktik sosial lainnya hingga menjadi bagian dari akal sehat kolektif. Pada titik itu, kekuasaan bekerja paling efektif karena tidak lagi terlihat sebagai kekuasaan, namun hadir sebagai kenyataan yang dianggap wajar.

Berdasarkan pandangan Foucault dapat diketahui juga bahwa wacana adalah sistem representasi yang membentuk cara kita berpikir, memahami dan berbicara tentang dunia atau realitas.<sup>43</sup> Namun tidak hanya mencerminkan realitas tetapi juga membentuknya. Dalam konteks hoaks, wacana yang dihasilkan melalui penyebaran informasi palsu dapat memengaruhi kebijakan publik. Sebuah wacana yang dirancang untuk menyesatkan dapat dianggap sebagai alat untuk mengendalikan persepsi publik

---

<sup>41</sup> Refaldi Andika Pratama, “Kekuasaan, Pengetahuan, Dan Hegemoni Bahasa Dalam Perspektif Michele Foucault Dan Francis Bacon,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 1 (2021): 36.

<sup>42</sup> Arif Syafiuddin, “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan: Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault,” *Refleksi: Jurnal Filsafat Islam Dan Pemikiran Keislaman* 18, no. 2 (2018): 147, <https://doi.org/10.14421/ref.v18i2.1863>.

<sup>43</sup> Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, 60.

dan mempengaruhi opini massa. Berdasarkan pemikiran Foucault, kekuatan hoaks terletak pada kemampuannya membangun “rezim kebenaran” alternatif yang berbeda dari narasi resmi atau fakta yang valid. Sistem kebenaran ini dapat berdampak pada cara masyarakat memahami dan menanggapi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik. Hoaks dapat berfungsi sebagai cara yang halus namun efektif untuk memengaruhi kebijakan publik. Penyebar hoaks dapat memengaruhi agenda kebijakan, mengalihkan perhatian dari masalah penting, atau bahkan mendorong pelaksanaan kebijakan tertentu yang menguntungkan kepentingan mereka dengan memanipulasi informasi dan membentuk persepsi publik. Ini sejalan dengan gagasan Foucault tentang *governmentality*, yang mengatakan bahwa pemerintah dalam pengertian kekuasaan adalah menggunakan segala daya, termasuk pengetahuan yang ada, untuk mengatur sesuai dengan kenyamanan atau keinginan yang hendak dicapai.<sup>44</sup>

Meski demikian, Foucault menegaskan bahwa tidak ada rezim kebenaran yang sepenuhnya mapan. Di setiap proses normalisasi selalu terdapat ruang resistensi, tempat munculnya wacana-wacana tandingan yang mempertanyakan, menegosiasikan, dan menggugat klaim kebenaran yang dominan. Dengan demikian, kebenaran selalu merupakan arena kontestasi yang terus berlangsung, bukan kondisi yang final dan tidak dapat diubah. Diskursus dibentuk oleh hubungan antara keinginan dan institusi, serta prosedur penguasaan dan pengendalian wacana yang bekerja melalui mekanisme pengecualian, penghalusan, dan penerapan yang secara sistematis menetapkan batas antara apa yang bisa dikatakan dan apa yang tidak. Dalam konteks kebijakan publik Indonesia, mekanisme inilah yang bekerja ketika narasi tertentu tentang sebuah kebijakan, baik yang disebarkan oleh pemerintah maupun oleh kelompok oposisi berhasil menguasai opini publik. Bukan karena narasi itu paling benar, melainkan karena paling berhasil masuk ke dalam kerangka berpikir yang sudah hidup di masyarakat. Dengan demikian, hoaks yang beroperasi melalui mekanisme wacana kekuasaan tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi harusnya turut memicu proses kontestasi makna, di mana masyarakat secara aktif membangun keyakinan dan narasi tandingan terhadap klaim-klaim yang mereka terima

Foucault juga membahas tentang *biopower*, yaitu kekuatan yang mengatur dan mengontrol kehidupan biologis populasi, dimana Foucault menganggap kekuatan dan pengetahuan yang dimiliki penguasa seolah dapat mengatur hidup dan tindakan atau keputusan manusia, ibaratnya kebijakan-kebijakan adalah penentu nasib publik.<sup>45</sup> Foucault mengungkapkan bahwa kekuasaan modern tidak lagi hanya bekerja melalui hukuman dan paksaan, tetapi juga melalui pengelolaan kehidupan masyarakat. Negara membentuk perilaku warga melalui kebijakan, institusi, dan norma sosial yang mengarahkan cara mereka hidup, berpikir, dan bertindak. Dengan cara ini, kekuasaan

---

<sup>44</sup> Michel Foucault, “Governmentality,” in *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, ed. Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller (Chicago: The University Of Chicago Press, 1991), 94.

<sup>45</sup> Foucault, *The History of Sexuality : Vol. I An Introduction*, 142–43.

tidak terasa sebagai tekanan dari luar, melainkan menjadi bagian dari kebiasaan dan cara pandang masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme *biopower* dapat dilihat dari upaya berbagai aktor, baik pemerintah maupun kelompok berkepentingan dalam membentuk opini publik melalui pemanfaatan jaringan buzzer di ruang digital. Peran Buzzer dalam dunia digital berperan dalam upaya mempengaruhi persepsi publik terkait isu politik atau yang berkaitan dengan langsung kebijakan publik, sehingga masyarakat menerima informasi secara masif dan akan menganggapnya sebagai kebenaran dominan.<sup>46</sup> Melalui penyebaran narasi tertentu, merekaberusaha memengaruhi cara masyarakat memahami dan menilai suatu kebijakan. Dalam banyak kasus, narasi yang dibangun cenderung menekankan legitimasi pemerintah sekaligus meredam kritik yang muncul di ruang publik. Praktik ini menunjukkan bahwa pertarungan politik tidak hanya berlangsung pada tingkat kebijakan, tetapi juga pada tingkat wacana, di mana dukungan publik dibentuk dan dipelihara melalui pengelolaan informasi. Dengan demikian, penggunaan buzzer dapat dipahami sebagai bagian dari strategi untuk memperoleh persetujuan sosial dan meminimalkan resistensi terhadap agenda kebijakan yang sedang dijalankan.

Bentuk nyata dari bentuk rezim kebenaran dan *biopower* yang dimaksudkan oleh Foucault bisa disaksikan dalam fenomena pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Hardiman dalam bukunya menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 menjadi situasi dimana rezim kebenaran dan biopolitis/biopower nyata. Aturan tentang protokol kesehatan bukan lagi menjadi urusan medis semata tetapi didalamnya urusan politis dan kemanan juga turut mengambil bagian, artinya kebenaran-kebenaran tidak lagi berdasarkan fakta atau keyakinan sains tetapi berdasarkan pengawasan biopolitis negara.<sup>47</sup> Dalam kerangka Foucault, pandemi adalah kondisi ideal bagi *biopower* untuk bekerja secara penuh karena ia menyediakan justifikasi moral yang tidak terbantahkan yakni untuk menjamin kesehatan masyarakat. Foucault dalam *Discipline and Punish* sendiri pernah menulis bahwa wabah atau pandemi melahirkan utopia dari kota yang diatur secara sempurna, wabah adalah pelaksanaan ideal dari kekuasaan yang mendisiplinkan, karena memberikan alasan bagi negara untuk mengatur setiap aspek kehidupan populasi atas nama keselamatan bersama.<sup>48</sup>

Salah satu contoh kebijakan publik lainnya yang belakangan banyak disorot adalah proyek MBG yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah telah membangun fondasi wacana sosial yang sangat kokoh melalui rangkaian narasi yang sangat meyakinkan tentang “anti-stunting”, “ketahanan pangan”, dan yang paling besar dari semuanya, wacana “Generasi Emas 2045”. Pemerintah secara langsung menegaskan bahwa MBG

---

<sup>46</sup> Faradiba Azzahra, “Potret Echo Chamber Digital Dan Krisis Demokrasi: Distorsi Opini Publik Di Era Algoritma Dan Buzzer Politikdi Indonesia,” *JP: Jurnal Polahi* 3, no. 3 (2025): 184–185, <https://jp.iregway.com/index.php/polahi>.

<sup>47</sup> Hardiman, *Kebenaran Dan Para Kritikusnya: Mengulik Idea Besar Yang Memandu Zaman Kita*, 144.

<sup>48</sup> Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 197–203.

adalah fondasi bagi Generasi Emas 2045. Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026, yang seluruhnya bersumber dari APBN. Besarnya anggaran ini justru menghadirkan risiko tata kelola yang besar karena tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Akan tetapi, Tercatat total 37.270 korban keracunan program MBG sejak Januari 2025 hingga Mei 2026, dengan namun tidak pernah ada satu pun proses penegakan hukum atas kejadian-kejadian tersebut.<sup>49</sup> Bahkan, Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pada program MBG. Namun, pemerintah tetap menjalankan program ini seolah-olah tanpa evaluasi atas berbagai persoalan yang terjadi.

Analisis wacana terhadap pemberitaan tentang MBG menunjukkan dua sisi berita yang jelas dan kontras, berita pro membingkai MBG sebagai program ambisius yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan terkait narasi "Generasi Emas 2045," sementara berita-berita kritis menyoroti kasus keracunan massal dan kegagalan implementasi. Dua narasi ini, jika dilihat dalam analisis Foucault mencerminkan pertarungan dua rezim kebenaran yang saling bersaing memperebutkan makna dari program yang sama, satu melihat MBG sebagai proyek kemanusiaan, yang lain melihatnya sebagai proyek kekuasaan yang gagal. Yang memenangkan pertarungan itu setidaknya adalah narasi pemerintah, karena memiliki seluruh infrastruktur komunikasi negara untuk mendistribusikan dan menaturalisasikan wacananya. Dalam kasus MBG, Foucault memberikan satu sumbangsih pemikiran bahwa rezim kebenaran dan *biopower* adalah dua hal yang saling berkelindan. Wacana dibuat untuk meyakinkan publik agar dapat dinaturalisasi secara perlahan sebagai kebenaran, sehingga kebijakan publik dapat dikendalikan sesuai keinginan penguasa.

Foucault meyakinkan pembacanya bahwa kekuasaan yang paling efektif bekerja bukan ketika memaksa, melainkan ketika tampil sebagai narasi yang perlahan menaturalisasi wacana hingga tampak sebagai kebenaran dan kepedulian. Inilah inti dari *governmentality* Foucault, kebijakan publik diproduksi dan disebarkan melalui wacana yang membuat kekuasaan terasa seperti bentuk perhatian negara terhadap rakyatnya. Presiden secara berulang menegaskan bahwa MBG adalah fondasi bagi Generasi Emas 2045, sebuah narasi yang disampaikan dari atas podium kepada ribuan pelaksana program di seluruh Indonesia dan dikumandangkan dalam setiap pidato kenegaraan. Setiap wacana itu diucapkan dalam kampanye dan pidato resmi yang sedang terjadi bukan sekadar penyampaian informasi kebijakan, melainkan produksi aktif rezim kebenaran yang memposisikan negara sebagai pelindung dan siapa pun yang mengkritik program sebagai pihak yang menentang kepentingan rakyat. Inilah yang Foucault maksud ketika mengatakan bahwa kekuasaan tidak hanya melarang, tetapi juga *memproduksi*, dan

---

<sup>49</sup> Shera Amalia Ghaita, "JPPI catat 37.270 Korban Keracunan MBG Sejak Januari 2025-Mei 2026", *Idntimes.com*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/jppi-catat-37-270-korban-keracunan-mbg-sejak-januari-2025-mei-2026-00-fcqw5-09484p> diakses pada tanggal 8 Juni 2026.

yang paling berbahaya dari produksi itu adalah ketika kebijakan yang gagal pun tetap dirayakan sebagai bukti kehadiran negara karena wacananya telah lebih kuat dari kenyataannya.

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa hoaks dalam kebijakan publik di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai informasi palsu, melainkan sebagai praktik diskursif yang bekerja melalui relasi kuasa untuk memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons kebijakan. Berdasarkan konsep pemikiran Michel Foucault, hoaks berperan dalam pembentukan rezim kebenaran melalui proses normalisasi, yaitu ketika suatu wacana diulang dan diterima secara terus-menerus hingga tampak sebagai akal sehat. Hoaks diyakini masyarakat bukan karena tidak ada perlawanan, melainkan karena masuk ke dalam ruang ketidakpercayaan yang sudah ada, lalu memperkuatnya menjadi cara pandang kolektif. Hal ini tampak dalam studi kasus Makan Bergizi Gratis, hoaks agama dan politik identitas menjelang Pemilu, serta berbagai pertarungan wacana selama pandemi Covid-19. Temuan ini menegaskan bahwa relasi kuasa-pengetahuan menjadi kunci dalam kerja hoaks, pihak yang menguasai wacana lebih berpeluang menentukan apa yang dianggap benar, sah, dan layak dipercaya di ruang publik, sekaligus memengaruhi arah kebijakan publik. Meski demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah sepenuhnya mutlak, karena selalu muncul wacana tandingan dan bentuk perlawanan yang menjaga pertarungan atas kebenaran tetap terbuka.

#### **Referensi**

- Abdullah Khozin Af. "Konsep Kekusaan Michel Foucault." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2012).
- Adiputra, Wisnu Martha. "Antara Kuasa Dan Kebohongan Dan Kebebasan Beropini Warga: Analisis Wacana Foucauldian Pada Hoaks Pandemi Corona Di Indonesia." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2021): 12–21.
- Albert Wirya. "Rezim Kebenaran Rasionalisme Dalam Diskursus Kegilaan Dan Tindakan Pendisiplinan Pasung Sebagai Kejahatan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 9, no. 1 (2013).
- Azzahra, Faradiba. "Potret Echo Chamber Digital Dan Krisis Demokrasi: Distorsi Opini Publik Di Era Algoritma Dan Buzzer Politikdi Indonesia." *JP: Jurnal Polahi* 3, no. 3 (2025). <https://jp.iregway.com/index.php/polahi>.
- Beta, A. Rivai, Sy. Nurul Syobah, M. Tahir, Ahmad Syahab, and Abdurrahman Amin. "Literasi Digital Pada Remaja Dalam Upaya Menangkal Informasi Hoax Jelang Pemilu 2024." *Jurnal JPPMI* 1 (2022). 6.
- Butar, Yopita Desriana. "Analisis Penyebaran Hoax Di Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat." *JPBB: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 2, no. 3

- (2024).
- Febriansyah, and Nani Murani Muksin. "Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, Dan Ancaman Disintegrasi Bangsa." *Jurnal Sebatik* 24, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1091>.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Edited by Alan Sheridan. Terj. New York: Discipline and Punish: The Birth of the Prison, 1975.
- . "Governmentality." In *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, edited by Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller. Chicago: The University Of Chicago Press, 1991.
- . *Power/Knowledge: Selected Interview and Other Writings 1972-1977*. Edited by C. Gordon. Terjemahan. New York: Pantheon, 1984.
- . *The Archaeology of Knowledge*. London dan New York: Routledge Classics, 1969.
- . *The History of Sexuality : Vol. I An Introduction*. New York: Pantheon Books, 1978.
- Hardiman, F. Budi. *Kebenaran Dan Para Kritikusnya: Mengulik Idea Besar Yang Memandu Zaman Kita*. Yogyakarta: Kanasius, 2023.
- Kamahi, Umar. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik." *Jurnal Al-Khitabah* 3, no. 1 (2017).
- Manokha, Ivan. "Konsep Foucault Tentang Kekuasaan Dan Diskursus Global Hak-Hak Asasi Manusia." In *Michel Foucault Dan Hubungan Internasional: Kajian Kritis Terkini*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman Dan Seksualitas*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Pratama, Refaldi Andika. "Kekuasaan, Pengetahuan, Dan Hegemoni Bahasa Dalam Perspektif Michele Foucault Dan Francis Bacon." *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 1 (2021).
- Putra, Febriansyah, and Haldi Patra. "Analisis Hoax Pada Pemilu: Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan Politik." *Naradidik: Jurnal Of Education & Pedagogy* 1, no. 2 (2023).
- Sarjito, Aris. "Hoaks, Disinformasi, Dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia." *Journal of Governance and Local Politics* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547>.
- Silalahi, Rut Rismanta, and Vinta Sevilla. "Rekonstruksi Makna Hoaks Di Tengah Arus Informasi Digital." *GLOBAL KOMUNIKA* 1, no. 1 (2020).
- Simarmata, Janner, Muhammad Iqbal, Muhammad Said Hasibuan, Tonni Limbong, and Wahyuddin Albra. *Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. yayasan kita menulis, 2019.
- Siregar, Mangihut. "Kritik Terhadap Teori Pengetahuan-Kekuasaan Foucault." *Jurnal Imlu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2021).
- Sofwatillah, Risnita, M. Syahrani Jailani, and Deassy Arestya Saksitha. "Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah." *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024). <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.

- Suyoga, I Putu Gede, and I Made Gede Anadhi. *Pemaknaan Hoax Sebagai Wacana Sosial. Prosiding Nasional Filsafat*. Denpasar: IHDN Press, 2019.
- Svendsen, Lars. *Filsafat Kebohongan*. Edited by Anton Kurnia. Terjemahan. Tangerang: Penerbit Baca, 2022.
- Syafiuddin, Arif. "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan: Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault." *Refleksi: Jurnal Filsafat Islam Dan Pemikiran Keislaman* 18, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14421/ref.v18i2.1863>.
- Syahputra, Iswandi. "Post Media Literacy: Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault." *Jurnal ASPIKOM* 1, no. 1 (2010).
- Wisnu Martha Adipura. "Antara Kuasa Dan Kebohongan Dan Kebebasan Beropini Warga: Analisis Wacana Foucauldian Pada Hoaks Pandemi Corona Di Indonesia." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2021).